



1 Oktober, Sanksi E-KTP Menunggu

Warga Tak Bisa Akses Seluruh Layanan Publik

YOGYAKARTA –Peringatan ini wajib diketahui oleh penduduk Kota Yogyakarta. Bagi warga yang sudah wajib KTP tapi belum melakukan perekaman e-KTP terhitung sampai 30 September 2016, maka diancam tak akan bisa mengakses seluruh layanan publik.

Sanksi tegas itu sesuai dengan surat edaran Kementerian Dalam Negeri. "Jika ada warga yang belum merekam data untuk membuat e-KTP, lantas dia mau mengakses Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) misalnya, otomatis akan ditolak," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) Kota Yogyakarta, Sisruwadi, kemarin. Dijelaskannya, mulai 1 Oktober 2016, seluruh layanan publik hanya diperuntukkan bagi warga yang sudah merekam data e-KTP. Selain layanan kesehatan, kebijakan tersebut juga menyangkut layanan transportasi, perizinan, dan layanan publik lainnya dari tingkat daerah hingga nasional.

Dindikcapil Kota Yogyakarta sendiri telah menyiapkan surat pemberitahuan ke seluruh instansi yang menangani pelayanan publik tersebut terkait kebijakan baru dari Kemendagri. "Kamiimbau kepada masyarakat Kota Yogyakarta yang belum merekam data kependudukan agar segera mendatangi kantor kecamatan masing-masing. Perekaman masih dilayani hingga 30 September 2016," kata Sisruwadi. Dari sekitar 312.000 penduduk Kota Yogyakarta wajib KTP, hingga saat ini tinggal menyisakan 7.500 warga atau 2,3% yang belum melakukan perekaman.

Ke Hal 10

Dari Hal 9
 Dari jumlah itu kemungkinan saat ini sudah ada yang meninggal, atau sedang kerja di luar daerah sehingga belum bisa mengurus.

Selain beberapa faktor tersebut, Dindikcapil juga menengarai adanya warga yang memiliki dua status kependudukan atau double KTP. Sisruwadi berjanji akan menghapus data administrasi jika terbukti adanya double KTP. "Yang double-double nanti akan kami hapus," ucapnya.

Diketahui, instruksi dari Kementerian Dalam Negeri, setiap warga negara Indonesia yang telah cukup umur wajib memiliki e-KTP paling lambat akhir September 2016. Untuk merealisasikan target pemerintah pusat tersebut, pemerintah tingkat daerah terus berupaya mengajak warga agar segera merekam e-KTP.

Di awal September nanti, Dindikcapil akan melakukan pemutakhiran data warga Kota Yogyakarta. Mekanismenya akan melalui pengurus RT dan RW untuk membagikan blanko kependudukan ke seluruharganya untuk diisi. "Blanko itu seperti kartu keluarga. Di sana ada pertanyaan sudah merekam belum, dan sebagainya. Akan diketahui nanti yang sudah meninggal, domisilinya sudah pindah, dan sebagainya," katanya.

Sedangkan bagi warga yang sudah merekam namun belum mendapatkan e-KTP, diminta aktif mengecek ke kantor kecamatan. Pasalnya masih banyak e-KTP fisik tapi belum diambil oleh pemilikinya.

@ristu hanafi
 Segera

Instansi	Tindak Lanjut
1.	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi
2.	<input type="checkbox"/> Untuk Diketahui
3.	

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Februari 2025
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005